

SKRIPSI

KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA BONE PUTE KECAMATAN TONRA KABUPATEN BONE

NURUL HIKMAWATI

E211 15 008



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2019





UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRAK

Nurul Hikmawati (E211 15 008) Kinerja Pemerintah Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Bone Pute, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone. xiv + 79 Halaman + 17 Tabel + 2 Gambar + 17 Buku + Lampiran. Dibimbing oleh Prof. Dr. Sulaiman Asang M. Si dan Dr. La Tamba M. Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Desa Bone Pute Kecamatan Tonra Kabupaten Bone.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti serta menyajikan data dan menganalisisnya. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara kepada informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang jelas terkait kinerja Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Desa Bone Pute, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone serta dilakukan observasi dan dokumentasi untuk mendukung hasil wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa sudah cukup baik, dengan melihat beberapa Indikator yang dikemukakan oleh Bernandian dan Russel yaitu Kuantitas kerja, Kualitas kerja, pengetahuan kerja, Kerja sama, Kreativitas dan Kualitas pribadi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan sudah cukup baik dan masih perlu ditingkatkan. Adapun indikator yang belum terpenuhi yaitu pengetahuan kerja dan kreativitas dari Pemerintah Desa yang masih dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Kunci: Kinerja, Pemerintah Desa, Pembangunan Desa





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRACT

Nurul Hikmawati (E211 15 008) Performance of the Village Government in the Implementation of Development in Bone Pute Village, Tonra District, Bone Regency. xiv + 79 Page + 17 Table + 2 Pictures + 17 Books + Appendixes. Guide by Prof. Dr. Sulaiman Asang M. Si, Dr. La Tamba M. Si.

This study aims to determine the performance of the Village Government in the context of implementing development in Bone Pute Village, Tonra District, Bone Regency.

The research approach used is descriptive qualitative research that seeks to provide an overview of the problems under study and present data and analyze it. Data collection techniques are through interviews with informants who are considered to be able to provide clear information regarding the performance of the Village Government in the context of implementing development in Bone Pute Village, Tonra District, Bone Regency, as well as observations and documentation to support the results of interviews.

The results of this study indicate that the performance of the Village Government in the context of implementing Village development is quite good, by looking at some of the Indicators put forward by Bernandian and Russell, namely Quantity of work, Quality of work, Knowledge of work, Cooperation and Personal Quality of the Village Government pretty good and still needs to be improved. The indicators that have not been fulfilled are the work knowledge and creativity of the Village Government which is still lacking in the implementation of development

s.



words : *performance, village government, development*

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Hikmawati

NIM : E211 15 008

Program Studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Kinerja Pemerintah Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Bone Pute Kecamatan Tonra Kabupaten Bone”** benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip ataupun yang di rujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Makassar 02, Mei 2019



Nurul Hikmawati

E211 15 008





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nurul Hikmawati
NIM : E211 15 008
Program studi : Ilmu Administrasi
Judul : Kinerja Pemerintah Desa Dalam Rangka Pelaksanaan
Pembangunan Di Desa Bone Pute Kecamatan Tonra
Kabupaten Bone

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II, dan dinyatakan sesuai dengan saran tim penguji skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 16 Mei 2018

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Sulaiman Asang, M.Si
NIP. 1961010 8198702 1001

TTD

Dr. La Tamba, M. Si
NIP. 195712311987021004

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Administrasi,

Dr. Nurdin Nara M.Si.
NIP 1963 0903 1989 03 1002





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

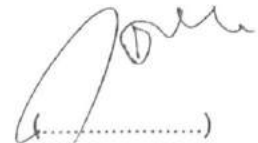
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nurul Hikmawati
NIM : E211 15 008
Program Studi : Ilmu Adminitrasi
Judul : Kinerja Pemerintah Desa Dalam Rangka Pelaksanaan
Pembangunan Di Desa Bone Pute Kecamatan Tonra
Kabupaten Bone

Telah diperiksa oleh pembimbing I dan II, dan dinyatakan sesuai dengan saran tim penguji skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dewan Penguji Skripsi

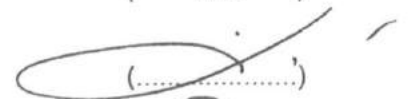
Ketua Sidang : Prof. Dr. Sulaiman Asang, M. Si



Sekretaris Sidang : Dr. La tamba, M.Si

(TTD)

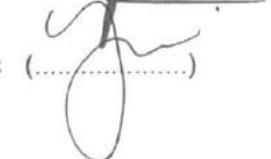
Anggota : Dr. Muhammad Yunus, MA



: Dr. Nurdin Nara, M.Si



: Andi Ahmad Yani, S.Sos M.Si, MPA, MSc



KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim, alhamdulillah rabbil 'alamin, Segala Puji bagi Allah *subhanahu wa Ta'ala* yang telah memberikan begitu banyak Rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis sampai saat ini, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kinerja Pemerintah Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Bone Pute Kecamatan Tonra Kabupaten Bone”**

Asshalatu was salam 'alaa Rasulillah, shawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah, Muhammad *Shallallaahu 'alaihi wa sallam*.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya kekurangan karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Dalam Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran, dukungan, dan juga bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kedua orang tua penulis. Bapak Ramang *Rahimahullah* dan Ibu Hasnah yang telah merawat, membesarkan dan mendidik penulis sampai seperti ini, Terima kasih tak



terhingga untuk setiap tetes keringatmu serta bait-bait doa yang engkau panjatkan disetiap sujudmu. Semoga Allah senantiasa selalu menempatkan kalian di tempat terbaik, baik di dunia maupun di akhirat Aamiin. Terima kasih untuk saudara-saudara ku Nur Faidah, Agus, Muhammad Ilham *Rahimahullah*, Suci Muliani, Hijrah, Asdar, Raudah Tul Jannah dan Anwar Hidayat yang telah banyak membantu penulis serta memberikan nasihat yang tak terhingga, yang menjadi penyemangat penulis untuk merajut masa depan yang lebih baik semoga Allah menambahkan Hidayah-Nya serta Rahmat Allah senantiasa menyertai kalian dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih pula untuk semua kerabat yang tak bisa saya sebutkan satu persatu semoga kelak kita semua di pertemukan dalam surga Allah *Aamiin ya robbal Alaamiin*.

Pada kesempatan penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA** selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di Universitas Hasanuddin.
2. **Prof Dr. Armin Arsyad, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para wakil Dekan Faklutas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
3. **Dr. Nurdin Nara, M.Si** selaku Ketua Departeman Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.



4. **Muh. Tang Abdullah, S.Sos, M.AP** selaku Sekertaris Departeman Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
5. **Prof.Dr. Sulaiman Asang, M.Si** selaku pembimbing 1 yang sangat berjasa bagi penulis, yang telah membantu, mengarahkan, mendorong dan memberikan motivasi kepada penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
6. **Dr. La Tamba, M. Si** selaku Pembimbing 2 yang sangat berjasa bagi penulis, yang telah membantu, mengarahkan, mendorong dan memberikan motivasi kepada penulis hingga penyelesaian skripsi ini
7. **Dr. Muhammad Yunus, MA, Andi Ahmad Yani, M.Si, MPA, MSc** dan **Dr. Nurdin Nara, M.Si** selaku Tim Penguji yang telah memberikan saran, kritikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
8. Seluruh Dosen maupun asistennya dan staf pegawai di lingkup Departeman Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
9. Terima kasih kepada Kepala Desa Bone Pute, Aparat Desa Bone Pute yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian dan bersedia membantu penulis selama melaksanakan penelitian.
10. Terima kasih untuk teman-teman **CHAMPION 15** telah kebersamai penulis dari Maba samapi hari ini terkhusus ketua angkatan Asnal dan Waketan Agung,



11. Terima kasih kepada Kakak senior dan adek-adek junior serta seluruh warga **HUMANIS FISIP UNHAS**
12. Terima kasih kepada seluruh warga **UKM Pencak Silat Panca Suci Fisip Unhas** teman-teman seperjuangan Wandu, tady, Aby Putu, Inna, Nita, Citra, Andin, Eky dan kalomang Squad. Terima kasih kepada kakak senior Ka sahyadi, Ka Arman, Ka Adnan, Ka rusli atas ilmunya dan seluruh warga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
13. Terima kasih kepada seluruh warga **UKM IBNU KHALDUN FISIP UNHAS** ka Kiki, ka Anita, Ka Eka, ka Windah, Ka Ayu, *syukron jazakillah khairan* atas ilmunya ka. Ukhti Daya, Mala, Tenri, Eki serta Dek Inna, Alm. Mia syukron ukh, dek atas kebersamaanya semoga selalu *istiqomah* di jalan Allah Aamiin.
14. Terima kasih yang tak terhingga kepada saudara-saudara ku **Merlin, Sarianti, Sri Restu, Hasrianti, Andi Nur Hasanah, Greace Sabrina Ruben, Siti Nurmukhlisa, Limrah, Zahra Vivi Oktaviani**. Singkat saja, terima Kasih telah menjadikan penulis bagian dari kalian. Semoga kita kembali di pertemukan nanti dengan keadaan yang lebih Baik. Sukses untuk kalian.
15. Bapak Ahmad selaku Kepala Dusun di Borong Taramppang Desa Bonto Bulaeng beserta Ibu Dusun, Nenek Bondeng, Nenek Aji, Kak Mail, Dek Khaerul dan Dek Aini, terima kasih tumpangnya dan bantuannya selama melaksanakan KKN semoga selau dalam lindungan Allah.



16. Terima kasih untuk teman-teman posko KKN Bonto Bulaeng gelombang 99 untuk Pak Kordes Kanda wawan, Ibu sekretaris Dilla, Ukhti Mira yang baik hati dan tidak sombong, Eva, Lisa, Pitto, ka Jan dan Ka aad
17. Terima kasih untuk semua orang yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	HALAMAN
ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Konsep.....	7
2.1.1. Pemerintah Desa	7
2.1.1.1. Konsep Pemerintah Desa.....	7
2.1.1.2. Kewenangan Pemerintah Desa	9
2.1.1.3. Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa	9



2.1.2. Konsep Kinerja	12
2.1.2.1. Pengertian Kinerja	12
2.1.2.2. Pengukuran Kinerja	13
2.1.2.3. Faktor Yang Mempengaruhi Penilaian Kinerja	19
2.1.3. Konsep Pembangunan	21
2.1.3.1. Pengertian pembangunan	21
2.1.3.2 Tujuan Pembangunan Nasional	26
2.1.3.3. Pembangunan Desa	28
2.2. Kerangka Konsep	29
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Lokasi Penelitian	33
3.2. Tipe Penelitian	33
3.3. Jenis dan Sumber Data	34
3.4. Informan Penelitian	34
3.5. Teknik Pengumpulan Data	35
3.6. Analisis Data	36
3.7. Definisi Operasional	38
 BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1. Legenda Dan Sejarah Umum Lokasi Penelitian	40
4.2. Kondisi Umum Desa	42
4.2.1. Kondisi Geografis	42



4.2.2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk	43
4.3. Gambaran Umum Pemerintah Desa Bone Pute.....	49

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Kinerja Pemerintah Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Bone Pute	54
5.1.1. Kuantitas Kerja (<i>Quantity Of Work</i>).....	54
5.1.2. Kualitas Kerja (<i>Quality Of Work</i>)	61
5.1.3. Pengetahuan Kerja (<i>Job Knowledge</i>)	64
5.1.4. Kreativitas (<i>Cretivity</i>).....	68
5.1.5. Kerja Sama (<i>Cooperate</i>)	70
5.1.6. Kualitas Pribadi (<i>Personal Quality</i>).....	72

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan	75
6.2. Saran.....	76
Daftar Pustaka	77
Lampiran	79



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Peristiwa Penting Desa Bone Pute	41
Tabel 2. Sarana Peribadatan.....	43
Tabel 3. Sarana Dan Prasarana Kesehatan	43
Tabel 4. Sarana Pendidikan	44
Tabel 5. Saran Umum Lainnya.....	44
Tabel 6. Pengelola Sarana Dan Prasarana	45
Tabel 7. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Tabel 8. Tingkat Pendidikan Menurut Ijazah Terakhir Yang Dimiliki Sd,Smp,Sma	46
Tabel 9. Tingkat Pendidikan Menurut Ijazah Terakhir Yang Dimiliki Diploma, Sarjana, Pascasarjana	46
Tabel 10. Status Kepemilikan Rumah.....	48
Tabel 11. Status Kepemilikan Sawah.....	48
Tabel 12. Klasifikasi kesejahteraan kepala keluarga di desa bone pute.....	49
Tabel 13. Daftar Kegiatan Pembangunan Yang Telah Terealisasi Tahun Anggaran 2018	55
Tabel 14. Daftar Sumber Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018	58
Tabel 15. Daftar Anggaran Pembangunan Desa Bone Pute Tahun 2018	59
Tabel 16. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bone Pute	64
Tabel 11. Susunan Daftar Penyusunan RKP Desa 2018	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konsep	32
Gambar 2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bone Pute	51



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa disebutkan dalam Pasal 1 ayat 9 bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Selanjutnya disebutkan dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa tujuan pembangunan Desa yang dinyatakan dalam pasal 78 ayat 1 bahwa pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, adapun tahap-tahap pembangunan Desa dinyatakan dalam ayat 2 yaitu pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan pengawasan.

Pembangunan Desa adalah pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan Desa bersifat multisektoral menyangkut semua kehidupan masyarakat, sehingga pembangunan Desa tidaklah pembangunan yang berdiri sendiri tetapi merupakan suatu kesatuan dengan pembangunan nasional di daerah. Sifat multisektoral yang melekat pada pembangunan Desa mengharuskan bahwa pembangunan Desa harus dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu, terpadu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tersebut dicapai, berdaya guna dan berhasil guna (Soewignjo, 1986).



Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa (pasal 23), Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain (pasal 25) Undang-Undang No 6 Tahun 2014.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Desa tentu sangat berperan dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di Desa dalam hal ini adalah Kepala Desa. Kepala Desa sebagai kepala Pemerintahan Desa harus mampu menjalankan tugas pokoknya yang tertuang dalam pasal 26 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Soewignjo (1986) dalam bukunya menyatakan bahwa pembangunan sebagai gerakan, dimana harus dilaksanakan secara menyeluruh di pedesaan. Sebagai gerakan maka diperlukan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang di landasi oleh kesadaran untuk meningkatkan dirinya dalam keadaan yang lebih baik. Dalam hubungan ini maka peranan kepemimpinan sangat menonjol. Dalam berbagai penelitian keberhasilan daripada pembangunan desa tampak besar sekali disebabkan oleh kepemimpinan yang tepat sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa berhasil atau tidaknya suatu pembangunan di Desa sangat ditentukan oleh pemimpinnya dalam hal ini Kepala Desa (Soewignjo, 1986)



Dari beberapa uraian diatas, menjelaskan bahwa keberhasilan dan kegagalan suatu program pembangunan sangat di tentukan oleh Pemerintah Desa terkait kinerjanya terutama Kepala Pemerintahan Desa sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang merencanakan, mengatur serta melaksanakan kegiatan pembangunan.

Berkaitan dengan hal diatas Onibala dkk (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan program pembangunan Desa sangat ditentukan oleh tingkat keteladanan Kepala Desa terkait Kinerjanya, yang sejauh mana Kepala Desa dalam merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, komunikasi, pengorganisasian dan pelaksanaan dapat dijalankan dengan baik. Pemerintah Desa selalu identik dengan berbagai keluhan akan pelayanan yang tidak maksimal. Kegagalan pembangunan disebabkan salah satunya karena kurangnya pengawasan dan peran Kepala Desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses berlangsungnya pelaksanaan pembangunan Desa (Onibala dkk, 2017).

Di Desa Bone Pute sendiri selama masa pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa yang sudah berlangsung tiga periode (diatur dalam pasal 39 pada ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 6 Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut) sampai saat ini ada beberapa keluhan dari masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan fisik yang kurang meningkat dan pembangunan yang tidak kunjung rampung, contohnya dari perbaikan infrastruktur



jalan yang tidak kunjung di kerjakan selama beberapa tahun, renovasi masjid yang belum rampung serta sarana dan prasarana (fasilitas yang menunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa) yang masih sangat kurang).

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Desa Bone Pute juga disebabkan karena kurangnya partisipasi dari masyarakat baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasannya sehingga masyarakat tidak memiliki rasa tanggung jawab akan pembangunan di Desanya. Sehingga melimpahkan semua tanggung jawab tersebut kepada Pemerintah Desa. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pembangunan dan partisipasinya dalam pembangunan di Desa. Hal tersebut menjadi kritik tersendiri kepada Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa Bone Pute beserta perangkat Desa belum melakukan upaya yang optimal dalam pemberdayaan masyarakat.

Dari beberapa permasalahan diatas jelas bahwa yang paling bertanggung jawab dalam setiap urusan pemerintahan di Desa adalah Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan di Desa dibantu oleh perangkat Desa. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 sudah seharusnya seorang Kepala Desa melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab terutama dalam bidang pembangunan baik pembangunan fisik, maupun pembangunan masyarakat Desa khususnya di Desa Bone Pute. Sebagaimana penjelasan diatas bahwa keberhasilan suatu pembangunan sangat dipengaruhi oleh Kinerja Pemerintah Desa.



Selain itu peran Kepala Desa dianggap sangat perlu dan penting guna untuk memperlancar proses pembangunan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Desa. Apabila peran Kepala Desa sudah maksimal maka sudah menunjukkan Kinerja yang optimal. Sehingga pelaksanaan pembangunan bisa berjalan dengan lancar tanpa terjadi penyimpangan-penyimpangan yang menghambat jalannya suatu program pembangunan.

berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait "**Kinerja Pemerintah Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Bone Pute Kecamatan Tonra Kabupaten Bone**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana kinerja Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bone Pute, Kecematana Tonra, Kabupaten Bone Selama tahun anggaran 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis menguraikan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu Untuk mengetahui bagaimana kinerja Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bone Pute, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone selama tahun anggaran 2018.



1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat pribadi

Menambah pengetahuan dan pengalaman pribadi penulis dalam hal menulis dan meneliti, termasuk menerapkan ilmu yang telah di dapatkan selama perkuliahan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan (input) bagi Pemerintah Desa Bone Pute, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone.

3. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Negara yang berkaitan dengan kinerja Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pembangunan. selain itu menambah bahan referensi dan komparatif bagi penelitian ilmiah dan selanjutnya dalam bidang yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Konsep

2.1.1 Pemerintah Desa

2.1.1.1 Konsep Pemerintah Desa

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa lebih lanjut dalam pasal 23 dijelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Menurut Rozali Abdullah dalam bukunya Pelaksanaan Otonomi Luas (2011) Pemerintah Desa terdiri dari perangkat-perangkat sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa. Seorang kepala desa haruslah seorang warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat, yang selanjutnya akan ditentukan dalam perda dengan tata cara pemilihan kepala desa. Dalam pemilihan kepala desa, calon yang memperoleh suara terbanyak, ditetapkan sebagai kepala desa terpilih.

Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun adapun kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Wali Kota paling lambat tiga puluh hari, setelah calon yang bersangkutan dinyatakan sebagai calon terpilih.



b. Perangkat Desa

Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Sementara itu, sekretaris desa yang sudah ada sebelum berlaku UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diisi oleh bukan Pegawai Negeri Sipil, namun secara bertahap diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdullah, 2011).

Lebih lanjut Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Adapun perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan yaitu:

1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat
2. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun
3. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang dari 1 tahun sebelum pendaftaran
4. Syarat lain ditentukan dalam peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



2.1.1.2 Kewenangan Pemerintah Desa

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Adapun kewenangan Desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
2. Kewenangan berskala Desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang No 6 Tahun 2014 BAB IV tentang Kewenangan Desa)

2.1.1.3 Tugas, Wewenang, Hak Dan Kewajiban Kepala Desa

Berdasarkan pasal 26 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa kepala desa mempunyai tugas yaitu:

- a) Menyelenggarakan pemerintahan Desa
- b) Melaksanakan pembangunan Desa
- c) Pembinaan kemasyarakatan Desa
- d) Pemberdayaan masyarakat Desa

Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa berwenang

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa



- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d) Menetapkan peraturan desa
- e) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f) Membina kehidupan masyarakat desa
- g) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i) Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m) Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- n) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berhak

- a) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa
- b) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa



- c) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan menerima lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
- d) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan dan
- e) Memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berkewajiban

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
- g) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
- h) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
- i) Mengelola keuangan dan Aset Desa
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
- k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa



- l) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
- m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa
- n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- p) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

2.1.2 Konsep Kinerja

2.1.2.1 Pengertian Kinerja

Pengertian kinerja menurut Sedarmayanti (dalam Nawawi, 2012) arti *performance* atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika (dalam Juanda Nawawi, 2012)

Kinerja berasal dari pengertian *performance*. Ada pula yang memberikan pengertian *performance* sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun sebenarnya, kinerja mempunyai makna yang luas, bukan hanya hasil kerja tetapi termasuk bagaimana prose kerja berlangsung.

Menurut Armstrong dan Barong (1998) seperti yang dikutip oleh Wibowo (2009) kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan startegis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian kinerja adalah tentang melakukan



pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya (Wibowo, 2009).

2.1.2.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Sebenarnya pengukuran kinerja mempunyai makna ganda, yaitu untuk pengukuran kinerja itu sendiri dan untuk evaluasi kinerja. Untuk melaksanakan kedua hal tersebut, terlebih dahulu harus ditentukan tujuan dari suatu program secara jelas. Setelah mendesain program, haruslah sudah termasuk penciptaan indikator kinerja atau ukuran keberhasilan pelaksanaan program yang bersangkutan, sehingga dengan demikian dapat diukur dan dievaluasi tingkat keberhasilannya.

Pengukuran kinerja merupakan penghubung antara perencanaan strategis dengan akuntabilitas. Suatu instansi pemerintah dapat dikatakan berhasil melaksanakan tugasnya, jika terdapat bukti bahwa indikator atau ukuran capaian sasaran terlaksana sesuai atau searah dengan misi yang telah dirumuskan. Tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicari pembenaran yang logis atas pencapaian misi organisasi instansi. Sebaliknya dengan disusunnya perencanaan strategis yang jelas perencanaan operasional dapat diukur, maka dapat diharapkan pembenaran yang logis dan argumentasi yang tepat untuk mengatakan bahwa suatu pelaksanaan program instansi tersebut berhasil atau tidak (Rahardjo Adisasmta, 2011)



Dalam hubungan pengukuran kinerja, beberapa hal penting perlu mendapat penekanan yaitu mengenai penetapan indikator kinerja, penetapan capaian kinerja, formulir pengukuran kinerja.

1) Penetapan indikator kinerja

Penetapan kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja kegiatan/program. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) serta indikator proses jika diperlukan untuk menunjukkan proses manajemen kegiatan yang telah terjadi. Perlu dicatat bahwa untuk indikator kinerja *input* dan *output* dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilakukan selesai. Sedangkan untuk indikator *outcome*, *benefit* dan *impact* baru diperoleh setelah beberapa waktu kegiatan selesai.

2) Penetapan capaian kinerja

Penetapan capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja dari pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh suatu instansi pemerintah. Pencapaian indikator-indikator tersebut tidak terlepas dari proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Misalnya, keterkaitan antara tingkat capaian kinerja output tertentu dengan proses



pencapaiannya seperti kecepatan dan keakuratan, ketaatan pada peraturan perundangan dan keterlibatan kelompok target terkait.

3) Formulir pengukuran kinerja

Untuk memudahkan melakukan evaluasi atas kesesuaian dan keselarasan antara kegiatan dan program, atau antara program penunjang dengan program utama atau antara program yang lebih rendah dengan program yang lebih tinggi, atau antara kebijakan instansi yang lebih rendah dengan kebijakan instansi yang lebih tinggi, dapat digunakan formulir pengukuran kinerja (Rahardjo Adisasmta, 2011: 92-93).

Adapun menurut Dwiyanto (1995) Indikator kinerja birokrasi public yaitu sebagai berikut:

1. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio anatar *input* dengan *output* .

2. Kualitas Layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasaan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indicator kinerja organisasi publik.



3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebaga salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi public dalam menjalankan misi dan tujuannya.

4. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi public itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implicit (Lenvine, 1990). Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi public tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat sebesar besar kebijakan dan kegiatan organisasi



publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Suatu kegiatan organisasi public memiliki akuntabilitas yang tinggi klaw kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Sementara itu Jerry Harbour (1997) dalam buku *The Basics Of Performance Measurrenment* (Sudarmanto, 2014) merekomendasikan pengukuran kinerja dengan 6 aspek, yaitu:

1. Produktivitas: kemampuan dalam menghasilkan produk barang dan jasa
2. Kualitas: pemroduksian barang dan jasa yang dihasilkan memenuhi standar kualitas
3. Ketepatan waktu (*timelinnes*): waktu yang diperlukan dalam menghasilkan produk barang dan jasa tersebut
4. Putaran waktu: waktu yang dibutuhkan dalam setiap proses perubahan barang dan jasa terebut kemudian sampai kepada pengguna
5. Penggunaan sumber daya: sumber daya yang diperlukan dalam menghasilkan produk barang dan jasa tersebut
6. Biaya: biaya yang diperlukan.

Lebih lengkapnya indikator kinerja menurut Bernandian & Russel (dalam Gomes, 2003) dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia mengemukakan delapan kelompok indikator dalam mengukur kinerja yang menilai atau mengevaluasi performansi kerja bedasarkan deskripsi perilaku yang spesifik yaitu sebagai berikut:



1. *Quantity of work* (kuantitas kerja)

Yaitu jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang ditentukan.

2. *Quality of work* (kualitas pekerjaan)

Yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya.

3. *Job knowledge* (pengetahuan kerja)

Luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilannya.

4. *Creativity* (kreativitas)

Keaslian gagasan yang dimunculkan dan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul.

5. *Cooperation* (kerja sama)

Kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain sesama anggota organisasi.

6. *Dependability* (keteguhan)

Kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan penyelesaian kerja.

7. *Initiative* (inisiatif)

Semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggungjawabnya.

8. *Personal quality* (kualitas pribadi)



Menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramah tamahan, dan integritas pribadi.

2.1.2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Penilaian Kinerja

James L. Perry dalam buku yang dieditnya, *Handbook of Public Administration* (dalam Gomes, 2003). Menjelaskan bahwa penilaian performansi seorang pekerja biasanya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Ras/Suku Bangsa

Penilaian performansi dipengaruhi oleh faktor ras dan atau suku bangsa. Pada studi Flaugher, Campbell, dan Pike tahun 1969 (Perry, hal. 393). Ditunjukkan bahwa supervisor yang mengadakan penilaian performansi bagi orang kulit putih dan kulit hitam. Orang berkulit hitam ternyata permonsinya dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan rekan-rekan kerjanya yang berkulit putih. Hasil studi tersebut menjelaskan bahwa ternyata ras merupakan faktor yang penting dalam evaluasi. Pada studi Landi dan Farr, tahun 1980 menunjukkan bahwa para pekerja yang dinilai cenderung memperoleh penilaian performansi yang tinggi dari para penilai yang berasal dari ras/suku bangsa yang sama.

2. Gender/Jenis Kelamin

Terdapat diskriminasi dalam penilaian performansi antara pekerja yang berjenis kelamin wanita denga yang laki-laki. Dari hasil studi Lovrich



dan Jones, tahun 1983 diperoleh penjelasan bahwa wanita dan laki-laki menilai proses performansi dengan cara yang sama. Namun demikian, banyak kaum wanita yang menilai bahwa mereka masih sering kurang diberi kepercayaan ditempat kerja dibandingkan dengan rekan-rekan kerja yang berjenis kelamin laki-laki. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa seorang wanita yang ingin mencapai pengakuan yang menonjol ia harus menjadi seorang yang ekstra berusaha, sementara kaum laki-laki menerima penilaian yang sama hanya dengan usaha yang tidak sebanding dengan usaha yang telah dilakukan oleh wanita.

3. Usia

Diskriminasi berdasarkan usia telah menjadi salah-satu faktor dalam penilaian performansi. Rhodes, tahun 1983, menemukan bahwa terdapat keyakinan yang luas bahwa usia mempengaruhi performansi banyak dari para pekerja yang berusia lebih tua, yang mempertahankan kemampuannya, menilai bahwa menerima nilai yang rendah bila penilaian dikaitkan dengan pembayaran berdasarkan sistem merit.

Upah yang tinggi cenderung jatuh kepada para pekerja yang berusia muda untuk mengikat mereka tetap dalam organisasi. Ada klaim dari para pekerja yang berusia agak tua yang mengatakan bahwa para supervisor yang masih muda biasanya cenderung menilai rendah performansi mereka yang sudah tua dibandingkan dengan mereka yang seusia supervisor atau yang masih muda.



2.1.3 Konsep Pembangunan

2.1.3.1 Pengertian pembangunan

Siagian dalam bukunya *Administrasi Pembangunan* (2008) menjelaskan bahwa pembangunan biasanya di definisikan sebagai "rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*national building*)". Menurut Siagian (2008), dari definisi diatas dapat memunculkan tujuh ide pokok yaitu sebagai berikut:

- a) Pembangunan merupakan suatu proses

Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan "bagian" dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*).

- b) Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.

Dengan perkataan lain jika dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara incidental, kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan.

- c) Pembangunan dilakukan secara terencana

yaitu baik dalam arti jangka panjang, sedang dan jangka pendek. Dan seperti dimaklumi merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang



tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan.

- d) Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan.

Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Perubahan mengandung makna bahwa suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari satu jangka waktu ke jangka waktu yang lain.

- e) Pembangunan mengarah kepada modernitas.

Modernitas diartikan antara lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya, cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tapi fleksibel. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan didefinisikan bersifat multidimensional. Artinya, modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat menjangkau dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan.

- f) Semua hal yang telah di singgung diatas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa.

sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi negara bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia karena mampu



menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara bangsa tersebut.

Lebih lanjut Afiffuddin (2010) mengemukakan bahwa istilah pembangunan harus dipahami dalam konteks yang luas. Alasan untuk mengatakan demikian karena terdapat kesepakatan yang mengatakan bahwa pembangunan harus mencakup segala sisi kehidupan dan penghidupan bangsa dan negara yang bersangkutan. Dalam konteks yang luas pembangunan mempunyai beberapa pengertian, yang didasarkan pada sudut pandang yang berbeda-beda (Afiffuddin, 2010). Beberapa pengertian pembangunan tersebut ialah sebagai berikut:

a. Pembangunan adalah perubahan

Perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Kondisi yang lebih baik itu harus dilihat dalam cakupan keseluruhan segi kehidupan bernegara dan bermasyarakat, oleh karenanya tidak hanya baik dalam arti peningkatan taraf hidup saja akan tetapi juga dalam segi-segi kehidupan lainnya.

b. Pembangunan adalah pertumbuhan

Yang dimaksud dengan pertumbuhan ialah kemampuan suatu negara untuk terus berkembang. Cakupannya pun adalah seluruh segi kehidupan. Sebagai wujud implementasinya, tidak adapun segi kehidupan yang luput dari usaha pembangunan.

c. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar di lakukan



Keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan. Berarti baik secara konseptual maupun secara operasional, tujuan dan berbagai kegiatan dengan sengaja ditentukan dalam seluruh potensi dan kekuatan nasional.

- d. Pembangunan adalah suatu rencana yang tersusun secara rapi.

Perencanaan mutlak dilakukan oleh dan dalam setiap organisasi, apa pun tujuannya, apa pun kegiatannya tanpa melihat apakah organisasi bersangkutan besar atau kecil. Negara merupakan organisasi, sehingga dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan para pimpinannya mau tidak mau pasti terlibat dalam kegiatan-kegiatan perencanaan.

- e. Pembangunan adalah cita-cita akhir dari perjuangan negara atau bangsa.

Pada umumnya komponen-komponen dari cita-cita akhir dari negara modern di dunia, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang, adalah hal-hal yang pada hakikatnya bersifat relative dan sukar membayangkan tercapainya titik jenuh yang absolut (mutlak). Berarti bahwa selama suatu negara bangsa ada, selama itu pulalah ia terus melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan.

Menurut Bryant dan White dalam buku Reformasi Administrasi dan Pembangunan Nasional yang ditulis oleh Prijono Tjiptoherijanto dan Said Zainal Abidin (1993) mengemukakan beberapa ciri pokok sebagai sasaran pembangunan strategis yang dianggap mereka sebagai hal yang mutlak bagi pembangunan yang sesungguhnya, diantara beberapa ciri pokok itu adalah:



- a. Meningkatkan kemampuan untuk menentukan hari depan yang lebih baik. Kemampuan ini tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi tetapi juga terkait dengan aspek politik dan sosial. Tidak hanya kemampuan untuk menjadi lebih produktif tetapi juga menyangkut nilai kemanusiaan dan peranannya dalam masyarakat dalam mempengaruhi penentuan masa depannya. Sebab itu peningkatan kemampuan diartikan baik secara mikro dalam konteks orang seorang maupun secara makro dalam pengertian pembangunan masyarakat atau pembangunan bangsa.
- b. Pemerataan. Pembangunan juga menyangkut kegiatan distribusi. Pembangunan baru berarti jika mampu memberi manfaat tidak hanya untuk sekelompok orang dalam masyarakat, tetapi juga bermanfaat bagi banyak orang. Di lain pihak, dalam arti positif pemerataan pembangunan perlu diterjemahkan dalam aksi strategis.
- c. Peningkatan kekuasaan. Pengertian ini menyangkut konsep politik, pembangunan ekonomi yang cenderung pada kenaikan atau peningkatan GDP atau GNP tidak sekaligus membawa keadilan. Keuntungan dari pembangunan biasanya cenderung jatuh lebih banyak ke tangan orang-orang yang lebih mampu atau berkuasa. agar tercapainya keadilan, dalam arti manfaat pembangunan ikut mempertimbangkan kepentingan golongan



lemah, maka diperlukan adanya usaha untuk member kekuasaan yang lebih banyak kepada mereka untuk ikut menentukan proses penyusunan kebijaksanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

- d. Berlanjut atau berkesinambungan. Karena pembangunan menyangkut hari depan yang lebih baik, maka perhitungan untuk tetap dapat mempertahankan kemampuan melangsungkan pembangunan di masa depan dianggapnya sangat penting. Pertimbangan ini terutama menyangkut sumber alam.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pembangunan bukan lagi sekedar menjadi objek studi dari satu dimensi ilmu saja, tetapi telah berkembang menjadi objek pembahasan yang bersifat multi dimensional. Dalam pada itu pembangunan yang dianggap mampu membawa keadilan dan mengangkat derajat kemanusiaan.

2.1.3.2 Tujuan Pembangunan Nasional

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam Pancasila UUD 1945 merupakan tujuan pembangunan yang bersifat kuantitatif, normatif dan formal. Sedangkan tujuan pembangunan nasional



dalam bentuk pragmatis, kualitatifnya atau kenyataan dalam masyarakat dapat dijabarkan dalam lima komponen yaitu:

a. Kemakmuran di bidang material

Kemakmuran di bidang material ini biasanya oleh rakyat kebanyakan, secara sederhana sering diartikan sebagai serba kecukupan dalam bentuk fisik terutama terwujud dalam bentuk tersedianya sandang, pangan dan papan.

b. Kesejahteraan mental

Kesejahteraan mental sering dikaitkan dengan tersedianya kesempatan untuk meningkatkan pendidikan dalam rangka penambahan pengetahuan dan keterampilan.

c. Ketentraman fisik dan rohaniah

Ketentraman fisik sudah barang tentu bertalian erat dengan keamanan terhadap berbagai jenis gangguan, baik menyangkut nyawa maupun harta benda seseorang. Ketentraman rohaniah berkaitan dengan kebebasan menganut suatu ajaran agama tertentu berdasarkan keyakinan seseorang. Ketentraman fisik dan rohaniah merupakan prasyarat untuk berlangsungnya kegiatan pembangunan nasional di berbagai bidang.

d. Kehormatan harkat dan martabat

Kebahagiaan yang manifestasinya tidak semata-mata dan bahkan tidak berwujud kebendaan, melainkan tidak kalah pentingnya ialah pengakuan atas tingginya harkat dan martabat manusia itu sendiri.



e. Masyarakat bangsa yang berkeadilan sosial

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa salah satu faktor pendorong pelaksanaan pembangunan nasional adalah kesenjangan yang kadang-kadang teramat lebar antara sekelompok kecil anggota masyarakat yang menikmati kemakmuran material yang sering dipandang berlebihan dengan mayoritas warga masyarakat yang tingkat keadaan kebendaanya menyedihkan dan oleh karenanya di kenal dengan kelompok miskin sehingga jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin sangat menonjol.

2.1.3.3 Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan Desa bersifat multisektoral menyangkut semua kehidupan masyarakat, sehingga pembangunan Desa tidaklah pembangunan yang berdiri sendiri tetapi merupakan suatu kesatuan dengan pembangunan nasional di daerah.

Sifat multisektoral yang melekat pada pembangunan Desa mengaruskan bahwa pembangunan Desa harus dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu, terpadu dalam perencanaan, pelaksanaan, pembangunan tersebut dicapai, berdaya guna dan berhasil guna (Soewignjo, 1986).

Dalam hubungan ini pembangunan Desa menempatkan dirinya dalam tiga sifat yaitu:

- Sebagai metode pembangunan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa, melalui pembangunan pedesaan, karena sebagian besar masyarakat



adalah tinggal dan berusaha di Desa. Masyarakat adalah subyek pembangunan.

- Sebagai program yang menyangkut berbagai segi terakumulasi dalam bentuk program-program yang pelaksanaannya di desa dan memerlukan keikutsertaan masyarakat Desa.
- Sebagai gerakan dimana harus dilaksanakan secara menyeluruh di Pedesaan (Soewignjo, 1986)

Dalam Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan pembangunan Desa dijelaskan bahwa pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, dalam pasal 3 disebutkan bahwa pembangunan desa mencakup empat bidang yaitu penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Selanjutnya dalam pasal 7 mengenai musyawarah perencanaan pembangunan Desa disebutkan bahwa sumber-sumber pembiayaan pembangunan Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa dan/atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

2.2 Kerangka Konsep

Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya (Wibowo, 2009). Dalam suatu pembangunan Desa kinerja Pemerintah Desa dikatakan tercapai ketika sudah menunjukkan hasil dimana setiap pembangunan sudah tercapai tujuannya dan sesuai dengan perencanaan



serta setiap unsur-unsur harus terlibat baik, dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.

Karena itu indikator kinerja menurut Bernardian dan Russel (dalam Gomes, 2003) adalah sebagai berikut:

1. *Quantity of work* (kuantitas kerja)
2. *Quality of work* (kualitas pekerjaan)
3. *Job knowledge* (pengetahuan kerja)
4. *Creativity* (kreativitas)
5. *Cooperation* (kerja sama)
6. *Dependability* (keteguhan)
7. *Initiative* (inisiatif)
8. *Personal quality* (kualitas pribadi).

Pembangunan Desa harus dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu, terpadu dalam perencanaan, pelaksanaan, pembangunan tersebut dicapai, berdaya guna dan berhasil guna (Soewignjo, 1986).. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat di Desa.

Keberhasilan suatu pembangunan salah satunya ditentukan oleh kinerja Kepala Desa karena Kepala Desa yang mengkoordinir kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Aparat Desa dan atau unsur masyarakat Desa untuk kelancaran suatu program pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 52 PERMENDAGRI NO 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pembangunan Desa yang dilaksanakan di harapkan sesuai



dengan apa yang di rencanakan dalam musyawarah pembangunan Desa dari segi biaya, waktu dan lain-lain.

Berdasarkan indikator kinerja menurut Bernandian dan Russel (dalam Gomes, 2003), peneliti hanya mengambil enam indikator kinerja yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam hal ini mengenai bagaimana kinerja Pemeintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa. Adapun indikator yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. *Quantity of work* (kuantitas kerja)
2. *Quality of work* (kualitas pekerjaan)
3. *Job knowledge* (pengetahuan kerja)
4. *Creativity* (kreativitas)
5. *Cooperation* (kerja sama)
6. *Personal quality* (kualitas pribadi).

Berdasarkan konsep diatas maka berikut adalah gambaran kerangka konsep penelitian:



Gambar 1 Kerangka Konsep

Kinerja Pemerintah Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Bone Pute, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone

